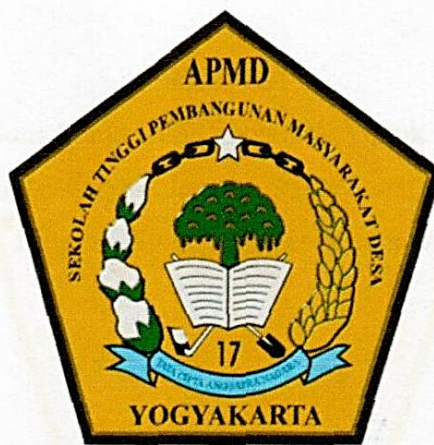


SKRIPSI
MEMBONGKAR PRAKTEK PARTISIPASI
DALAM DESA MEMBANGUN DI KALURAHAN SINGOSAREN,
KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL



Disusun oleh:

YOHANES DESALES LABA LAWER
21520076

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025



HALAMAN JUDUL

MEMBONGKAR PRAKTEK PARTISIPASI

DALAM DESA MEMBANGUN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh :

Yohanes Delasales Laba Lawer

21520076

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Juli 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si
Dosen Pembimbing

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.
Penguji Samping I

Drs. R.Y Gatot Raditya, M.Si
Penguji Samping II

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Delasales Laba Lawer

NIM : 21520076

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“MEMBONGKAR PRAKTEK PARTISIPASI DALAM DESA MEMBANGUN DI KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL”** adalah karya tulis yang saya buat sendiri, disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang strata satu (S1) di Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kekurangan data atau pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Yohanes Delasales Laba Lawer
21520076

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Yohanes Delasales Laba Lawer

NIM : 21520076

Telp : 081339630819

Email : yandeslawer@gmail.com

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"MEMBONGKAR PRAKTEK PARTISIPASI DALAM DESA MEMBANGUN DI KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL"

beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 06 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Yohanes Delasales Laba Lawer
21520076

MOTTO

Yesaya 4: 10

“Janganlah takut sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kananKu yang membawa kemenangan”

Amsal 28:13

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

Yohanes Delasales Laba Lawer

“Reiq Bahe Nore Neq Lala” (Semuanya Pasti Ada jalan)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaan dan hikmat yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Desa Dewa Tana, Kabupaten Sumba Tengah” dengan baik untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu memberikan hikmah dan kesehatan
2. Kepada kedua orang tua saya Bapak tercinta Benediktus Beni Ali dan ibu tercinta Dorothea Dari. Terima kasih kepada bapak dan Ibu yang telah melahirkan dan mendukung saya sampai saat ini.
3. Kepada kakak saya kakak Frater Beni Leu, Rius Lawer, dan Aleng Lawer. Yang sudah mendoakan saya dan juga mendukung saya hingga menyelesaikan skripsi saya.
4. Kepada keluarga Besar Lawer Neq dan Benidau terimakasih yang selalu membantu dan mendorong serta mendukung saya selama ini.
5. Kepada kekasih saya Selfiana Beto Ruing terimakasih sudah menemani saya hingga sampai saat ini sekaligus menyemangati saya selama ini dalam menjalankan kuliah serta mendukung saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena perlindungan dan penyertaan-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Membongkar praktek partisipasi dalam desa membangun"** dengan baik. Untuk penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku ketua STPMD "APMD" Yogyakarta.
3. Bapak Gregorius Sahdan. S.IP., M.A. selaku ketua program Studi ilmu pemerintahan
4. Bapak Minardi S.IP. M.Sc selaku Dosen pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberi banyak ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Pemerintah dan Masyarakat Desa Singosaren yang sudah mengizinkan penulis untuk meneliti
7. Kepada teman-teman Keluarga Besar Lamabayung Yogyakarta
8. Kepada keluarga seperjuangan saya yaitu Komunitas Mahasiswa Kedang Yogyakarta sebagai ruang diskusi dan berdinamika saya.

9. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan kontribusi yang sudah diberikan.

penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk pengembangan penulisan lebih lanjutnya.

10. Kepada crew Matador dan perjuangan Ngincep uhuui sebagai teman canda tawa dan sebagai teman diskusi

11. Kepada Keluarga kecil Hektor Kost sebagai tempat saya mengeluh dan berbagi rasa kekeluargaan.

12. Untuk saya sendiri yang selalu kuat tanpa tak henti.

Yogyakarta 12 februari 2025

Penulis



Yohanes Delasales Laba Lawer
21520076

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Literatur Review.....	9
G. Kerangka Konseptual	11
1. Berdesa dan Pemerintah Desa	11
2. Desa Membangun.....	16
3. Partisipasi Dalam Pembangunan	21
H. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Unit Analisis.....	25
3. Teknik Pengumpulan Data	26
4. Teknik analisis data	27

BAB II BERDESA DAN DESA MEMBANGUN DI KALURAHAN	
SINGOSAREN	29
A. Visi dan Misi	29
B. Program Pembangunan di Kalurahan Singosaren	32
1. Tahap Perencanaan	32
2. Tahap pelaksanaan	39
3. Tahap Pengawasan dan Evaluasi	41
C. Kondisi Pemerintah Desa	42
1. Struktur Orgsnisasi Pemerintah Desa	42
D. Mekanisme partisipasi Masyarakat di Kalurahan Singosaren	47
1. Partisipasi Masyarakat di Tingkat RT.	48
2. Partisipasi Masyarakat di Tingkat Padukuhan	48
3. Partisipasi Masyarakat di Tingkat Desa	49
BAB III51 MEMBONGKAR PRAKTEK PARTISIPASI DI KALURAHAN	
SINGOSAREN	51
A. Melihat partisipasi eksploitasi di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul	51
B. Desa membangun dan partisipasi Pembangunan di Kalurahan Singosaren sebatas formalitas saja	55
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN – LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penganggaran Kegiatan Pembangunan	40
Tabel 2. 2 Nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Singosaren	44
Tabel 2. 3 Nama-nama LPMD Desa Singosaren	44
Tabel 2. 4 Tim Penggerak PKK Desa Singosaren	45
Tabel 2. 5 Jumlah Peserta yang Hadir pada Musyawarah di Tingkat Padukuhan	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan Singosaren	43
--	----

INTISARI

Membongkar Praktek Partisipasi Dalam Desa Membangun merupakan proses kritis untuk mengungkapkan secara mendalam bagaimana partisipasi masyarakat sebenarnya berlangsung dalam proses pembangunan desa di Kalurahan Singosaren. Persoalan mengenai praktek partisipasi dalam desa membangun masih dihadapi Kalurahan Singosaren. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan Singosaren masih cenderung bersifat formal dan procedural, bukan partisipasi yang lahir dari kesadaran kritis warga. Terjadi kecenderungan pelimpahan tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat tanpa diimbangi ruang dialog yang memadai. Penelitian ini berjudul Membongkar Praktek Partisipasi Dalam Desa Membangun di Kalurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek partisipasi dalam pembangunan desa dan mengapa terjadi penurunan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Kalurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana praktek partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta mengetahui bagaimana faktor penghambat dan pendukung praktek partisipasi masyarakat dalam pembnagunan desa.

Metode dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Obyek dalam penelitian ini adalah membongkar praktek partisipasi dalam desa membangun sedangkan subyek penelitian dilakukan secara purposive dengan wawancara terperinci bersama 8 informan yakni para aparatur pemerintahan dan masyarakat kalurahan singosaren. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktek partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Kalurahan Singosaren lebih banyak bersifat formalitas dan tidak sepenuhnya mencerminkan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dari dua indikator yang menjadi fokus penelitian yaitu praktek berdesa dan pemerintah desa serta desa membngun dan partisipasi Pembangunan. Partipartisipasi masyarakat umumnya terbatas pada kehadiran dalam forum musyawarah dan pelaksanaan kegiatan fisik, seperti kerja bakti tanpa adanya ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat secara kritis dan konstruktif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dimana dominasi aparat desa dalam menentukan arah Pembangunan, kurangnya transparansi informasi, serta minimnya upaya pemberdayaan warga untuk berperan lebih dalam. Temuan ini menunjukan bahwa pentingnya pembenahan dalam pola komunikasi, struktur pengambilan Keputusan, dan pendekatan pemberdayaan agar partisipasi dalam desa membangun benar-benar berjalan secara pertisipatif, inklusif dan berkeadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan pembangunan desa merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait untuk menggambarkan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Nur dkk (dalam Ningsih, 2023), desa adalah unit administrasi yang paling rendah dalam struktur pemerintahan otonom, yang memiliki instansi pemerintahan dan masyarakat yang memainkan peran penting dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan menjadi krusial untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung secara terstruktur dan berkelanjutan.

Adisasmita (Amanda, 2015) menyatakan bahwa pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah secara efektif dan stabil. Strategi pembangunan desa seharusnya berfokus pada peningkatan kapasitas dan semangat masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahap proses pembangunan. Ciri utama dari pembangunan desa yang ideal adalah partisipasi langsung masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa harus dilakukan dengan tepat dan akurat untuk memastikan peningkatan kemampuan masyarakat dalam jangka panjang (Irwan et al., 2021).

Siti Hajar Irwan Syari Tanjung Yurisna Tanjung Zulfahmi (2018) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan individu

dalam mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada di masyarakat. Partisipasi ini mencakup beberapa tahapan, seperti menerima dan menanggapi informasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengembangan. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting baik sebagai input maupun output. Output dari partisipasi adalah hasil dari aksi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan proses pembangunan. Tanpa partisipasi masyarakat, proses pembangunan cenderung terhambat. Partisipasi aktif masyarakat memberikan informasi dan data yang akurat mengenai kondisi riil di lapangan, termasuk kebutuhan dan permasalahan yang ada. Dengan demikian, kebijakan pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang sesungguhnya (Masruri, 2020).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga dapat dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan program-program pembangunan, kontribusi sumber daya, serta kerjasama dalam organisasi atau kegiatan tertentu. Hal ini juga mencakup pembagian manfaat dari program pembangunan dan proses evaluasi terhadap hasilnya (Satka, 2015). Menurut Sarifah (2016), partisipasi masyarakat mencakup proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada, pemilihan alternatif solusi, pelaksanaan upaya untuk mengatasi masalah, serta keterlibatan dalam evaluasi perubahan yang terjadi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya penting dalam perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang berkelanjutan.

Segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan peran serta masyarakat, karena masyarakatlah yang dapat

mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Masyarakatlah yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayahnya, termasuk didalamnya adalah pembangunan ditingkat desa. Selain itu juga, dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah desa selaku penyelenggara pemerintahan dan pelaksana program-program pembangunan harus mampu meningkatkan efesiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan. Namun yang terjadi di Kalurahan Singosaren transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan kesanya ditutup-tutupi oleh pihak pemerintah kalurahan tidak ada kejelasan dari pemerintah desa berkaitan dengan pengelolaan pembangunan.

Sikap masyarakat amat penting dalam memberikan partisipasi terhadap program-program pembangunan, walaupun terdapat beberapa kemungkinan respon dilapangan. Pada prinsipnya setiap pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat harus selalu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan kliennya (masyarakat) yang ada dibawahnya, akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Untuk memperbaiki mutu pemberdayaan salah satu caranya adalah memenuhi apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Banyak individu-individu dalam organisasi pemerintah yang menafsirkan keluhan dari masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diberikan adalah suatu peluang untuk memperbaiki keadaan dari yang kurang sempurna menjadi sempurna. Fenomena yang terjadi di Kalurahan Singosaren adalah partisipasi masyarakat hanya melibatkan pihak tertentu dan orang-orang yang dianggap punya kedekatan dengan pemerintah desa sedangkan masyarakat yang tidak punya

kedekatan dengan pemerintah desa tidak diundang misalnya dalam hal pembahasan anggaran pembangunan.

Pelaksanaan otonomi desa secara empiris membawa perubahan dan inovasi dari sistem penyelenggaraan pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang berfungsi sebagai pengayom, pelayan dan pembina. Pergerakan partisipasi masyarakat dan sub-sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional, sehingga kalurahan atau desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan adat istiadat setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, urusan penyelenggaraan pemerintah desa menjadi kewenangan desa dalam pelaksanaan pembangunan. Artinya desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi *independen community* sehingga setiap warga desa dan masyarakat pada dasarnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri atau desa berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta desa juga memiliki peranan strategis sebagai ujung tombak pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek, baik itu perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program.

Meskipun berbagai regulasi dan program mendorong partisipasi aktif masyarakat namun dalam praktiknya partisipasi ini sering kali menemui berbagai kendala. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat di tingkat desa seringkali tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Beberapa faktor yang menghambat partisipasi mencakup kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program-program desa, dominasi

kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan, kurangnya keterampilan teknis warga, hingga adanya budaya birokrasi yang hierarkis yang membuat masyarakat merasa kurang diberdayakan dalam proses pembangunan.

Merujuk pada mazhab Timoho, partisipasi masyarakat masuk kedalam salah satu mazhab yaitu *governance*. Partisipasi merupakan relasi antara masyarakat dan pemerintah dalam tatakelola pemerintahan. *Governance* adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. (Widodo, 2001:18). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan Negara tetapi juga peran perbagai pihak diluar pemerintahan dan Negara, sehingga pihak yang terlibat juga sangat luas termasuk masyarakat.

Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bias juga di artikan pemerintahan. Dari segi fungsional, aspek *governance* apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau justru sebaliknya dimana pemerintah tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi.

Kalurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, merupakan salah satu desa yang aktif dalam berbagai program pembangunan. Lokasinya yang strategis, dekat dengan perkotaan Yogyakarta, menjadikannya desa yang berpotensi besar untuk berkembang secara mandiri. Desa ini telah menerima berbagai alokasi anggaran desa dan memiliki beragam program pembangunan, mulai dari pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, seperti

banyak desa lainnya, Kalurahan Singosaren juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat.

Keterlibatan masyarakat di Kalurahan Singosaren dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan belum optimal. Partisipasi masyarakat sering kali masih terbatas pada segelintir kelompok atau tokoh tertentu, seperti perangkat desa, kelompok-kelompok formal dan beberapa warga yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi dan sumber daya. Sebagian besar warga desa, khususnya yang berada di lapisan bawah, kurang memiliki kesempatan untuk berperan aktif atau bahkan kurang memahami tujuan dari program yang dilaksanakan. Akibatnya, program-program yang ada cenderung lebih dipahami dan dijalankan oleh pihak tertentu, sementara sebagian besar warga menjadi penerima pasif tanpa keterlibatan langsung.

Selain itu, hasil dari beberapa program pembangunan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas praktik partisipasi yang diterapkan selama ini. Tidak jarang terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan warga dengan program yang dijalankan, sehingga ada kemungkinan besar program yang seharusnya bermanfaat tidak berkelanjutan karena tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian mendalam untuk membongkar praktik partisipasi di Kalurahan Singosaren. Dengan memahami lebih jauh bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebenarnya berjalan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta persepsi masyarakat terhadap program yang ada, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk

mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga menggali peluang perbaikan yang dapat memperkuat partisipasi warga dalam setiap aspek pembangunan desa. Kejadian yang terjadi di Kalurahan Singosaren banyak masyarakat yang tidak ikut serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat kalurahan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul membongkar praktek partisipasi dalam desa membangun di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul guna membongkar praktek partisipasi sehingga program-program pembangunan di Kalurahan Singosaren melibatkan seluruh elemen masyarakat dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam merancang kebijakan dan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga pembangunan desa lebih efektif, tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalurahan Singosaren.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktek partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul?
2. Mengapa terjadi penurunan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis memfokuskan penelitian ini untuk menggambarkan

bagaimana praktek partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Melihat partisipasi eksploitasi di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul
2. Melihat Desa membangun dan partisipasi pembangunan di Kalurahan Singosaren sebatas formalitas saja.

D. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan bagaimana praktek partisipasi yang terjadi di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Untuk menggambarkan model partisipasi di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Bantul.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya penelitian yang fokusnya pada analisis praktek partisipasi dalam pembangunan desa serta Hasil dari penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kalurahan Singosaren Kapanewun Banguntapan Kabupaten Bantul.

F. Literatur Review

Literatur Review pada prinsipnya adalah aktivitas melakukan tinjauan terhadap berbagai literatur, karya atau hasil penelitian terdahulu yang mengkaji topik yang sama atau mendekati topik yang akan diteliti. Literatur review berisi tentang dialog antar karya peneliti yang terdahulu.

1. Penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa yang ditulis oleh M. Wahyuddin, H. Mustari dan Harna. Jurnal Phinisi Integration Review volume 3 Nomor 1 Februari 2020, halaman 90-99. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi yang terbentuk di masyarakat Desa Pattaneteang yaitu partisipasi dalam bentuk tenaga dan pelaksanaan, partisipasi dalam bentuk harta benda atau uang, partisipasi dalam bentuk keterampilan yang dimiliki dan partisipasi gagasan atau ide. Partisipasi tidak langsung yang ada di Desa Pattaneteang dari penjelasan kepala desa membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi di masyarakat Desa Pattaneteang yaitu, secara internal di antaranya faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Dari sisi eksternal, terdiri dari faktor kepemimpinan pemerintahan desa, BPD, peralatan/fasilitas pendukung pembangunan, tingkat intensitas interaksi dan tingkat transparansi yang ada di desa.

Penelitian ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Namun yang menjadi pembeda adalah jurnal ini menyimpulkan bahwa partisipasi dilihat dari tenaga dalam pelaksanaan pembangunan, dalam bentuk harta benda atau uang dan dalam bentuk ide atau gagasan. Sedangkan penulis memfokuskan pada kenapa sampai terjadi praktek partisipasi masyarakat yang digerakan oleh uang.

2. Penelitian lain dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang ditulis oleh Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda dan Beby Masitho Batubara. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Volume 3 Nomor 2 2021, halaman 192-200. Dalam penelitian ini menggunakan metode metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa masih rendah dengan kehadiran masyarakat belum sepenuhnya menghadiri undangan pada pelaksanaan musrenbang desa karena didasari dengan beberapa alasan salah satunya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa untuk memberikan hasil keputusan dan partisipasi masyarakat dalam bentuk memberikan usulan untuk dijadikan prioritas program serta memberikan saran/ktitikan terhadap sebuah program yang ditawarkan juga masih rendah berdasarkan dari tingkat kehadiran masyarakat. Adapun Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa adalah faktor internal terdiri dari rendahnya kesadaran masyarakat, tingkat pendidikan, dan pekerjaan serta penghasilan masyarakat. Dan faktor eksternal terdiri dari peran pemerintah Desa seperti

kurangnya sosialisasi dan Fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sedangkan penulis memfokuskan pada Mengapa terjadi penurunan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan desa yang dilihat dari modal sosial dan akses masyarakat dalam Pembangunan desa.

3. Penelitian dengan judul Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa yang ditulis oleh Ecin Sante, Vecky A. J. Masinambow, Jacline I. Sumual. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 23 Nomor 1 2023, halaman 109-120. Penelitian ini menggunakan metode analisis skala likert dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa Penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan berpengaruh positif dan idak signifikan terhadap pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam pengorganisasian dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan pembangunan desa. Sedangkan secara bersama-sama partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa di Desa Tabulo Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo.

G. Kerangka Konseptual

1. Berdesa dan Pemerintah Desa

Desa berasal dari istilah dalam bahasa Sansekerta yang berarti tanah tumpah darah. Menurut definisi universal, desa adalah kumpulan dari beberapa permukiman di area pedesaan atau rural area. Istilah desa di Indonesia merujuk kepada pembagian wilayah administratif yang berada di

bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Desa adalah suatu kumpulan dari beberapa pemukiman kecil yang biasa disebut Kampung (Jabar), Dusun (Yogya), atau Banjar (Bali) dan Jorong (Sumbar). Sebutan lain untuk Kepala Desa adalah Kepala Kampung, Petinggi (Kaltim), Klebun (Madura), Pambakal (Kalsel), Kuwu (Cirebon), Hukum Tuan (Sulut).

Desa berkembang dengan nama lain sejak berlakunya otonomi daerah seperti di Sumatra Barat dengan sebutan Nagari, Gampong dari Aceh, dan dikenal dengan istilah sebutan kampung di Papua, Kutai Barat. Semua institusi lain di desa juga bisa mengalami perbedaan istilah tergantung kepada karakteristik adat istiadat dari desa tersebut. Perbedaan istilah tersebut merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan dari pemerintah terhadap asal usul adat setempat yang berlaku. Walaupun begitu, dasar hukum desa tetap sama yakni didasarkan pada adat, kebiasaan dan hukum adat.

Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (3) adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala desa yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dimana dalam fungsi dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa

menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa.

Dengan begitu kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa dan dibantu oleh Perangkat Desa selaku pembantu tugas-tugas Kepala Desa. Diantara unsur pemerintah desa yaitu unsur kepala (Kepala Desa), unsur pembantu kepala atau staf (Sekretaris Desa dan para Kepala Urusan), unsur pelaksana teknis fungsional (para Kepala Seksi), dan unsur pelaksana teritorial (Kepala Dusun), senantiasa ditata dalam suatu kesatuan perintah dari Kepala Desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi Pemerintah Desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggungjawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintah Desa.

Selain kepala desa dan aparat desa, desa juga memiliki badan permusyawaratan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam mengatur

kepentingan masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik terhadap masyarakat agar dapat menumbuhkan kehidupan yang sejahtera, tentram dan berkeadilan. Dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan layanan masyarakat, pemerintah desa harus memperhatikan hubungan kemitraan kerja untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam upaya untuk menjalankan roda pemerintahan didesa, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola rumah tangganya. berbicara mengenai kewenangan berarti bicara tentang lingkup dan wilayah kuasa. Maknanya bisa berarti hak dan kewajiban. Menyitir Sutoro Eko dalam buku “Kedudukan dan Kewenangan Desa” (2014, 40), “Kewenangan merupakan kekuasaan dan hak seseorang atau lembaga untuk melakukan sesuatu, atau mengambil keputusan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki empat kewenangan. Kewenangan tersebut meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta adat istiadat desa (pasal 18 UU Desa). Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur menteri, yang akan ditindak lanjuti oleh bupati/walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Berkaitan dengan kewenangan ini, Bhenyamin Hoessein (*disertasi*, 1993:102), menjelaskan bahwa pengaturan dapat diartikan sebagai kewenangan untuk menciptakan norma hukum tertulis yang berlaku umum dan mengenai hal yang abstrak sementara pengurusan sebagai kewenangan untuk melaksanakan dan menerapkan norma hukum umum dan abstrak kepada situasi konkrit. Dengan kata lain,

pengaturan berkaitan dengan kewenangan membentuk kebijakan (*rules making*), sementara pengurusan dengan kewenangan melaksanakannya (*rules application*). Mengikuti pengertian di atas, maka pemerintahan yang memiliki sekaligus kewenangan pengaturan dan pengurusan (sendiri) dapat dipandang sebagai pemerintahan otonom (Bhenyamin, 2001:90).

Tujuan pengaturan kewenangan desa yang berdasarkan pada asas rekognisi dan asas subsidiaritas adalah untuk pencapaian kemandirian desa agar masyarakat desa menjadi subyek pembangunan. Selain itu diharapkan Desa bisa berperan dalam perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya untuk menjalankan roda pemerintahan di desa, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola rumah tangganya. berbicara mengenai kewenangan berarti bicara tentang lingkup dan wilayah kuasa. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Kewenangan juga berkaitan dengan pembentuk kebijakan di Desa.

2. Desa Membangun

Konsep “membangun desa” dan “desa membangun” memiliki pengertian yang berbeda meskipun keduanya terkait erat dalam konteks Pembangunan, keduanya muncul dari gagasan dasar yang mendasari frasa tersebut, meski tak sepenuhnya diakui dalam wacana dan teori Pembangunan yang ada. Untuk memahami perbedaan secara sistematis

antara pemabangunan pedesaan (membangun desa) yang berada dalam ranah pemerintah, dan Pembangunan desa (desa membangun), Eko Sutoro (2014:38-39) menjelaskan beberapa perbedaan. Dalam hal isu, “membangun desa” cenderung fokus pada bagaimana suatu desa di wilayah tertentu dapat berkembang, seiring dengan pertumbuhan penduduk, meningkatnya lapangan pekerjaan, serta adanya dukungan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Dalam konteks ini, peran pemerintah sebagai penguasa sangat dominan, sementara desa berada dalam posisi objek. Di sisi lain, konsep “desa membangun” menekankan pada kemampuan desa untuk berkembang secara mandiri tanpa intervensi dari pemerintah. Desa tersebut memanfaatkan berbagai potensi lokal yang ada serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Dengan demikian, pembangunan yang terjadi dalam konteks desa membangun tidak bersifat top-down, melainkan berlangsung dari bawah ke atas.

Amanulloh (2015:9-11) menjelaskan bahwa dengan adanya Undang-Undang Desa yang mengakui Desa sebagai subjek hukum dalam kerangka asas rekognisi dan subsidiaritas, demokratisasi desa muncul sebagai frase yang sangat mencerminkan substansi dari undang-undang tersebut. Pentingnya demokratisasi desa didasarkan pada dua hal. Pertama, dalam konteks demokrasi, definisi umum mengenai kekuasaan juga berlaku di desa, yaitu bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan berada di tangan rakyat. Ini berarti bahwa masyarakat atau warga desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan di desa, bukan elit atau penyelenggara pemerintahan desa. Kedua, salah satu aspek fundamental dalam Undang-Undang Desa adalah pengakuan oleh Negara terhadap hak asal-usul desa (dikenal sebagai asas

rekognisi) serta penetapan kewenangan yang berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (dikenal sebagai asas subsidiaritas). Dengan kedua asas tersebut, desa memiliki kewenangan yang signifikan untuk mengatur dan mengelola diri mereka sendiri. Amanulloh (2015:9-11). Sesuai dengan prinsip desa membangun, yang menempatkan desa sebagai subjek utama dalam proses pembangunan serta mengedepankan tradisi berdesa, model pembangunan yang sebelumnya di gerakan oleh masyarakat kini bertransformasi menjadi pembangunan yang digerakan oleh desa (*village driven development*) model ini beberapa karakteristik penting (Eko, 2014:45-46):

- a. Desa berfungsi sebagai kesatuan kolektif yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat.
- b. Kepentingan serta kegiatan dalam pemerintahan dan pembangunan terjalinkan dan terlembagakan secara menyeluruh dalam sistem desa.
- c. Kemandirian desa didukung oleh kewenangan, diskresi dan kapasitas lokal yang ada.
- d. Kepala desa tidak hanya berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, melainkan berfungsi sebagai pemimpin yang mewakili masyarakat.
- e. Otoritas dan akuntabilitas dan akuntabilitas pemerintah desa didasarkan pada legitimasi yang diperoleh dari masyarakat.
- f. Desa memiliki pemerintah yang kuat, mampu mengali potensi lokal, serta memberikan perlindungan langsung kepada seluruh warga, termasuk kelompok marginal dan perempuan yang kurang beruntung.

- g. Proses demokratisasi desa mencakup penerapan nilai nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas, kesetaraan gender dan penciptaan institusi untuk perwakilan dan deliberasi; serta keterlibatan antar pelaku dalam komunitas.
- h. Perencanaan dan penganggaran dilaksanakan secara inklusif dan partisipatif, dengan dasar aset lokal.
- i. Pembanguna berorientasi pada asset penghidupan lokal.
- j. Pentingnya keberadaan warga yang kritis, aktif, dan terorganisir. Hubungan antar warga dalam komunitas sangat penting, namun tidak cukup; dibutuhkan juga partisipasi aktif, kesadaran politik, dan pemahaman terhadap hak dan kepentingan mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Desa dan upaya membangun desa merupakan bagian integral dari Pembangunan perdesaan. Paradigma lama mengenai pembangunan desa cenderung berorientasi pada negara, bersifat otokratis dan pendekatan topdown yang sentralistik, serta sectoral. Sebaliknya, paradigma baru tentang Pembangunan desa mengusung semangat pengakuan dan subsidiaritas yang lebih mengedepankan masyarakat. Menurut Eko (2014:37), terdapat beberapa kriteria yang dapat menjadi tolak ukur dalam mendefinisikan desa yang sedang membangun, antara lain:

- a. Mendorong pertumbuhan desa yang berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Memastikan adanya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Mengedepankan nilai-nilai kebebasan sebagai landasan.
- d. Menghargai dan melestarikan kearifan lokal yang dimiliki desa.

- e. Melaksanakan pembangunan secara holistik dan menyeluruh.
- f. Negara berperan dalam menciptakan kerangka hukum yang kondusif serta mendukung berkembangnya institusi lokal agar dapat tumbuh mandiri.

Desa membangun adalah suatu upaya untuk mencapai kesejahteraan dengan memanfaatkan prakarsa dan sumber daya lokal yang ada. Dengan demikian, semua potensi tersebut dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan bersama. Konsep desa membangun sangat penting untuk menyentuh berbagai dimensi kehidupan masyarakat desa, seperti dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini akan mendorong terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan, sambil tetap menghormati nilai-nilai, budaya, dan karakteristik yang ada di dalam desa tersebut.

Selain itu, pembangunan desa tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketertinggalan seperti yang tercantum dalam konsep pembangunan desa. Lebih dari itu, tujuan utama adalah menjadikan desa sebagai basis penghidupan masyarakat yang berkelanjutan dan membangun kemandirian desa. Pembangunan desa seharusnya tidak hanya dilihat sebagai objek, melainkan harus bertransformasi menjadi subjek. Dalam hierarki pemerintahan, peran pemerintah diharapkan tidak ikut campur dalam proses pembangunan, melainkan murni berasal dari prakarsa lokal. Sebagaimana kita ketahui, pemahaman tentang kebutuhan seseorang tidak hanya berdasarkan analisis pihak lain, melainkan harus ditinjau dari sudut pandang individu itu sendiri. Hal yang serupa juga berlaku untuk pembangunan desa; hanya masyarakat setempat yang benar-

benar memahami apa yang mereka butuhkan dan strategi apa yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Partisipasi Dalam Pembangunan

Makna mendasar dari partisipasi adalah "proses berbagi dan ikut serta". Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks partisipasi, negara memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat. Partisipasi merupakan proses yang memungkinkan anggota masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka dan turut serta dalam pembuatan keputusan serta berbagai aktivitas perencanaan. Dalam proses ini, berbagai pihak yang memiliki kepentingan berusaha mempengaruhi pemegang kewenangan dan kontrol saat merumuskan inisiatif pembangunan, mengambil keputusan, serta menentukan alokasi sumber daya yang nantinya dapat berdampak pada mereka (World Bank, 1996).

Pemahaman mengenai ide partisipasi sebenarnya memiliki keberagaman makna yang sangat luas. Partisipasi dapat dilihat sebagai prinsip, proses, maupun ruang. Sebagai prinsip dan nilai dasar, partisipasi menjadi semangat yang menggerakkan seluruh tahapan dalam pembuatan kebijakan. Di sisi lain, partisipasi juga dapat dilihat sebagai serangkaian proses kebijakan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada publik, dengan cara meningkatkan kualitas interaksi yang bersifat dua arah dan saling menguntungkan antara pemerintah dan warganya. Selain itu, partisipasi menciptakan arena yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan publik untuk terlibat aktif (International IDEA 2002).

Menurut Keith Davis dalam Sastropetro (2001:55), partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pertama, partisipasi melalui konsultasi, di mana masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat atau masukan, biasanya dalam bentuk layanan yang memfasilitasi komunikasi antara warga dan pemerintah. Kedua, sumbangan spontan, berupa uang atau barang yang diberikan secara sukarela oleh warga untuk mendukung kegiatan pembangunan. Ketiga, pendirian proyek mandiri yang dibiayai oleh sumbangan individu atau lembaga di luar desa, seperti donatur atau pihak ketiga, yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Keempat, pembangunan proyek yang sepenuhnya dibiayai oleh komunitas lokal, di mana keputusan pendanaan dan pelaksanaan dilakukan melalui musyawarah desa. Kelima, kontribusi tenaga kerja, khususnya dari para ahli lokal atau warga yang memiliki keahlian teknis, sehingga mengurangi beban biaya pelaksanaan proyek. Keenam, pembangunan yang dilakukan antaranggota keluarga, yang meskipun berskala kecil, tetap menjadi bentuk partisipasi nyata dalam memperbaiki lingkungan sekitar. Terakhir, pembangunan proyek komunitas yang bersifat otonom, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dijalankan secara mandiri oleh komunitas tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal. Keseluruhan bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup ide, tenaga, dan inisiatif kolektif.

Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124), partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan fisik atau materi semata, tetapi sebagai sebuah upaya kolektif dan kesadaran bersama yang dilandasi oleh semangat gotong royong untuk membangun masa depan yang lebih baik. Partisipasi mencerminkan tujuan bersama seluruh warga negara yang berasal dari beragam latar belakang dalam kerangka Negara Pancasila, dengan menjunjung hak dan kewajiban yang setara. Lebih dari sekadar pelibatan teknis, partisipasi juga berarti kontribusi yang bernilai, baik secara moral maupun sosial, dengan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan desa, partisipasi harus dilihat sebagai bentuk keterlibatan aktif dan bermakna yang menjunjung martabat manusia serta menjamin keberlanjutan demi generasi mendatang.

Dimana menurut peneliti bentuk partisipasi yang terjadi di Kalurahan Singosaren selaras dengan pandangan Keith Davis dalam Sastropetro (2001:55). Partisipasi masyarakat di Kalurahan Singosaren tidak hanya hadir dalam bentuk tenaga kerja melalui kerja bakti, tetapi juga tampak dalam bentuk sumbangan barang dan jasa, keterlibatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, hingga inisiatif mandiri komunitas dalam menjaga lingkungan.

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat seremonial atau formalitas, terutama dalam tahapan perencanaan dan evaluasi. Hal ini terlihat dari minimnya pemahaman warga terhadap mekanisme laporan keuangan, kurangnya

keterlibatan dalam proses pengawasan, serta dominasi aktor-aktor tertentu dalam pengambilan keputusan pembangunan. Dengan demikian, partisipasi yang seharusnya bersifat aktif dan otonom masih belum sepenuhnya terwujud.

Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun partisipasi masyarakat di Kalurahan Singosaren telah mencakup berbagai bentuk sebagaimana dikemukakan Keith Davis, pelaksanaannya masih perlu diperkuat secara kualitas agar mampu mendorong pembangunan desa yang benar-benar partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Dibutuhkan upaya peningkatan literasi warga terhadap mekanisme pembangunan, serta penguatan peran lembaga desa agar partisipasi tidak hanya simbolik, melainkan menjadi kekuatan nyata dalam proses desa membangun.

desa, penting untuk menekankan analisis partisipasi dengan memperhatikan indikator-unsur dan syarat yang mendasarinya. Keberadaan atau tidaknya partisipasi dapat dilihat dari pelaksanaan unsur dan syarat yang ada, apakah sudah dilaksanakan secara lengkap atau belum. Unsur utama partisipasi meliputi keterwakilan dan keterlibatan masyarakat, sementara syarat yang diperlukan antara lain keleluasaan, kesediaan, kepercayaan, serta kemampuan. Jika semua syarat dan unsur partisipasi telah terwujud sepenuhnya, hal itu menunjukkan bahwa partisipasi tersebut benar-benar ada. Sebaliknya, jika unsur dan syarat tersebut belum terpenuhi, maka partisipasi juga belum dapat dikatakan optimal.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan atau memaparkan dan menganalisis data. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif Dimana peneliti akan berusaha menggambarkan dan melukiskan keadaan yang ada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan ditemukan saat berada di lapangan (Moh. Nasir, 2005:54) artinya data yang diperoleh adalah kata-kata gambaran dan mungkin juga angka-angka akan disajikan secara deskriptif.

2. Unit Analisis

a. Objek Penelitian

Obyek penelitian yaitu membongkar praktik partisipasi dalam desa membangun di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

b. Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu masyarakat desa, pemerintah desa, kelompok rentan dan marginal, dan pemangku kepentingan. Teknik pengambilan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode teknik purposive yakni mengambil narasumber yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu pada pihak terkait yang relevan dengan pembahasan untuk dijadikan sumber data yang diperlukan yang menjadi narasumber.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kalurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan, Labupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memberikan informasi kaya dengan data-data yang menunjang untuk penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi menurut Moleong (1990:126) adalah mengoptimalkan kemampuan penelitian dari multi kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Hal ini mungkin bagi peneliti melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subjek penelitian hidup pada saat ini. Hal ini memungkinkan pula peneliti merasa apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama. Dalam penelitian ini yang diamati adalah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.

b. Wawancara

Wawancara menurut Moleong (1990:35) percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Orang-orang yang peneliti wawancarai antara lain: masyarakat desa, pemerintah desa, kelompok rentan atau marginal, dan pemangku kepentingan.

c. Dokumentasi

Tahap dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan arsip-arsip atau dokumen yang bersifat penelitian. Menurut Moleong dokumentasi

adalah metode pengumpulan data yang didasarkan kepada dokumen-dokumen atau catatan yang ada di lokasi penelitian.

4. Teknik analisis data

Cara menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis. Proses analisis dan pengumpulan data berjalan beriringan selama penelitian di lapangan (Sugiyono, 2013:333). Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode analisis kualitatif antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan menyederhanakan data lapangan. Metode ini dilakukan supaya data bisa dimaksimalkan dan dibuat semudah mungkin tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penelitian ini hanya berdasarkan pada data yang akurat dan relevan. Proses ini terjadi secara terus-menerus dari awal hingga akhir dilaksanakannya penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang didapatkan disusun dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif maka akan memudahkan pemahaman tentang situasi yang terjadi di lapangan dan menentukan langkah kerja berikutnya sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh.

c. Verifikasi Data

Proses analisis akan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan dan verifikasi data diharapkan dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan tetapi

mungkin juga tidak dikarenakan masalah dan rumusan masalah yang diajukan di awalnya bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan perkembangan penelitian di lapangan.

BAB II

BERDESA DAN DESA MEMBANGUN DI KALURAHAN SINGOSAREN

Praktek berdesa dan desa membangun di Kalurahan Singosaren merupakan proses pembangunan yang bertumpu pada prinsip kemandirian, gotong royong, dan partisipasi masyarakat. Konsep "desa membangun" yang dijalankan di Kalurahan Singosaren pada dasarnya menekankan pada kemampuan desa untuk menggali dan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, baik dari aspek sumber daya manusia maupun sumber daya alam, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pembangunan

A. Visi dan Misi

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya dipresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil Pembangunan yang dicapai melalui program-program pembanguan dalam bentuk rencana kerja. Visi Lurah Desa Singosaren untuk enam tahun mendatang (2024-2029) adalah “terwujudnya desa singosaren yang agamis, kuat, maju, damai, Sejahtera, dan gotong royong dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan social budaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

Visi tersebut mengandung bahwa Pemerintah Desa Singosaren berkeinginan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada serta nilai-nilai luhur social budaya untuk mewujudkan kehidupan agamis, kuat, maju, damai, Sejahtera, dan gotong royong. Makna dari dsri masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Agamis dalam arti mewujudkan kondisi masyarakat yang masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan.
2. Kuat dalam arti pemerintah desa bersama masyarakat akan senantiasa bahu membahu gigih berjuang menghadapi setiap tantangan dalam Pembangunan desa.
3. Maju dalam arti desa yang menikmati standar hidup yang relative tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata.
4. Damai dalam arti kehidupan masyarakat yang adem, tentram dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah persatuan dan keharmonisan.
5. Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Singosaren terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, kebudayaan, Pendidikan, rekreasi, serta tersedianya lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya.
6. Gotong royong dalam arti bersemangat untuk saling membantu dan kerjasama secara sukarela.

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah desa yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan dari segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Desa Singosaren dalam RPJM Desa tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat desa yang religius, sehat dan bersih lahir batin dalam setiap bidang kehidupan dalam bentuk peribadatan kepada Allah SWT.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat yang bertumpuh pada keadilan dengan memaksimalkan asset desa (tanah khas desa, pasar desa, parkir wisata dan tenaga kerja di lingkungan perusahaan) serta Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3. Meningkatkan kualitas bidang pendidikan formal dann non formal baik dari segi sarana maupun tenaga kependidikan meliputi PAUD, TK, kejar paket B dan C maupun kursus-kursus.
4. Meningkatkan bidang kesehatan dan lingkungan, pengelolaan sampah mandiri, tamanisasi dan tempat bermain.
5. Meningkatkan bidang kepemudaan dan olahraga (Karang Taruna) sebagai usaha menyiapkan generasi penerus yang teguh dan tanggap terhadap perubahan zaman.
6. Meningkatkan bidang sosial budaya sebagai ekspresi kearifan lokal menuju desa wisata dan membuka kawasan cagar budaya Bokong Semar.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang efektif, transparan dan akuntabel serta mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga desa.
8. Melakukan sinergi pembangunan infrastruktur yang terpadu dan berkesinambungan.

B. Program Pembangunan di Kalurahan Singosaren

1. Tahap Perencanaan

pada tahun 2023 kalurahan singosaren melakukan beberapa kegiatan Pembangunan sebagai bagian dari implementasi visi desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan Pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan ini merupakan hasil dari musyawarah perencanaan Pembangunan desa (MUSRENBANGKal) tahun sebelumnya yang menjaring berbagai aspirasi masyarakat melalui RT, RW dan Lembaga desa. Pembangunan pada tahap ini mencakup tiga aspek yaitu Pembangunan infrastruktur fisik seperti (cor blok, jalan, talud, drainase), Pembangunan ekonomi (penguatan BUMKal dan padat karya tunai) dan pemberdayaan masyarakat (pelatihan dan kegiatan sosial).

Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJMdesa). Desa Singosaren pada dasarnya merupakan penjabaran visi dengan misi dengan memperhatikan prioritas Pembangunan yang akan dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, berbagai program dan kegiatan yang dirumuskan merupakan pilihan yang didasarkan potensi dan permasalahan yang ada.

Dalam aspek pembiayaan telah mempertimbangkan berbagai sumber pendanaan, antara lain dari bantuan pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten), APBDes dan partisipasi masyarakat. Secara sistematis rencana program dan kegiatan mulai tahun 2024-2029 dapat dilihat seperti dalam lampiran program pembangunan desa dijabarkan sesuai dengan misi Lurah terpilih. Adapun program pembangunan Desa Singosaren adalah sebagai berikut:

a. Program Misi Pertama

“Mewujudkan masyarakat desa yang religious, sehat, dan bersih lahir batin dalam setiap bidang kehidupan dalam bentuk peribadatan ALLAH SWT”.

Program atau kegiatan:

- 1) Pelatihan/peningkatan kapasitas da'i/muballigh/ustad TPA.
- 2) Pembinaan kaum rais/takmir masjid dan musholla.
- 3) Pembinaan DBKS.
- 4) Penyelenggaraan festival anak sholeh
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana rumah ibadah

b. Program Misi Kedua

“Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang bertumpu pada keadilan dengan memaksimalkan asset desa (tanah khas desa, pasar desa, parkir wisata, dan tenaga tenaga kerja di lingkungan perusahaan) serta membentuk badan usaha milik desa (BUMDesa)”.

Program atau kegiatan:

1. Mengembangkan pariwisata tingkat desa (Kawasan Bokong Semar)
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana milik desa
3. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana milik desa
4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan kolam perikanan darat
5. Pemeliharaan kolam perikanan darat milik desa
6. Bantuan perikanan (bibit dan pakan)

7. BinteK/pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat
8. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)
9. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang)
10. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana
11. Pembangunan/ peningkatan saluran irigasi tersier/ sederhana
12. BinteK/pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan
13. Pelatihan manajemen koperasi KUD/UMKM
14. Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif/UMKM
15. Pembentukan badan usaha milik desa (persiapan dan pembentukan BUMDes)
16. Pelatihan pengelolaan BUMDes
17. Bantuan permodalan BUMDes
18. Pemeliharaan pasar desa/kios milik desa
19. Pembangunan/rehab pasar desa/kios milik desa
20. Pengelolaan terpadu kawasan taman parkir Singosaren
21. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan ekonomi perempuan
22. Fasilitasi kelompok masyarakat di bidang pertanian (Gapoktan dan KWT)

c. Program Misi Ketiga

“Meningkatkan kualitas bidang pendidikan formal dan non formal, baik dari segi sarana maupun tenaga pendidikan meliputi PAUD, TK, kejar paket B dan C maupun kursus-kursus”.

Program atau kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan PAUD, TK dan TPA
- 2) Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana PAUD, TK, dan TPA
- 3) Penyuluhan/pelatihan pendidikan bagi masyarakat (literasi digital)
- 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan dan sanggar belajar milik desa
- 5) Peningkatan sarana/prasarana perpustakaan taman bacaan desa dan sanggar belajar milik desa
- 6) Pengelolaan perpustakaan milik desa
- 7) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin yang berprestasi
- 8) Penyelenggaraan program kejar paket B dan C

d. Program Misi Keempat

“Meningkatkan bidang kesehatan dan lingkungan, pengelolaan sampah mandiri, tamanisasi dan tempat bermain”.

Program atau kegiatan:

Penyelenggaraan pos kesehatan desa dan polindes milik desa.

1. Penyelenggaraan posyandu.
2. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan.
3. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan (PSN, BB4K).

4. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), dan bina keluarga lansia (BKL).
 5. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
 6. Pembangunan gedung posyandu.
 7. Peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu.
 8. Penyelenggaraan posbindu.
 9. Perencanaan kampung KB.
 10. Pembinaan kampung KB.
 11. Pemeliharaan sanitasi pemukiman.
 12. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa (penampungan, bak sampah).
 13. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah.
 14. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa.
 15. Pengelolaan hutan milik desa (wanadesa).
 16. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup.
- e. Program Misi Kelima
- “Meningkatkan bidang kepemudaan dan olahraga (karang taruna) sebagai usaha menyiapkan generasi penerus yang tangguh dan tanggap terhadap perubahan zaman”.
- Program/kegiatan:
- 1) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa

- 2) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan melalui organisasi peran dan fungsi karang taruna dan organisasi kepemudaan yang lain.
- 3) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa.
- 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.
- 5) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.
- 6) Pembinaan karang taruna/klub pemuda/olahraga tingkat desa.

f. Program Misi Keenam

“Meningkatkan bidang sosial budaya sebagai ekspresi kearifan lokal menuju desa wisata dan membuka kawasan Cagar Budaya Bokong Semar”.

Program/kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan festival kesenian, adat, budaya, dan keagamaan.
- 2) Revitalisasi nilai tradisi dan budaya lokal.

g. Program Misi Ketujuh

“Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang efektif, transparan, dan akuntabel serta mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga desa”.

Program/kegiatan:

- 1) Pelayanan administrasi perkantoran.
- 2) Program peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintah desa melalui Pendidikan berkelanjutan.

- 3) Program peningkatan kualitas menerapkan system manajemen mutu.
- 4) Peningkatan kesejahteraan aparatur desa.
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- 6) Peningkatan disiplin aparatur.
- 7) Reformas anggaran untuk (transparansi pengelolaan anggaran desa).
- 8) Program peningkatan sinergitas antar lembaga pemerintah desa.
- 9) Pelatihan/pembinaan PKK.
- 10) Pelatihan/pembinaan LPMD.
- 11) Pelatihan/pembinaan FKpm.
- 12) Pelatihan/pembinaan pokgiat.
- 13) Penyediaan insentif/operasional Rt.
- 14) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban.
- 15) Persiapan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal desa.

h. Program Misi Kedelapan

“Melakukan sinergi Pembangunan infrastruktur yang terpadu dan berkesinambungan”.

Program/ kegiatan:

- 1) Pemeliharaan jalan desa.
- 2) Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/ gang.
- 3) Pemeliharaan saluran rainase atau selokan.
- 4) Pemeliharaan gedung, prasarana, balai desa, dan balai kemasyarakatan.
- 5) Pemeliharaan pemakaman/ situs bersejarah/ petilasan milik desa.

- 6) Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan/ pengerasan jalan desa.
- 7) Pembangunan dan rehabilitasi pengerasan jalan lingkungan pemukiman.
- 8) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan saluran rainase atau selokan
- 9) Pembangunan dan rehabilitasi balai desa/ balai kemasyarakatan.
- 10) Pembuatan/ pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa.
- 11) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa.
- 12) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni GAKIM.
- 13) Pemeliharaan sumur resapan milik desa.
- 14) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumur resapan.
- 15) Pembuatan rambu-rambu di jalan desa.
- 16) Penyelenggaraan informasi public desa.
- 17) Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa.
- 18) Pengadaan/ rehabilitas peningkatan sarana dan penerangan jalan.

2. Tahap pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Singosaren diawali dengan perencanaan teknis yang disusun melalui Musyawarah Desa (Musdes) pada akhir tahun 2022, yang dipimpin oleh Lurah bersama BPKal guna membahas prioritas pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat. Setelah itu, tim teknis dari kalurahan bersama pendamping desa melakukan survei lapangan dan pengumpulan data teknis untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar teknis kegiatan pembangunan seperti

jalan cor blok, talud, dan saluran air. Seluruh dokumen perencanaan tersebut kemudian diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kabupaten Bantul untuk memperoleh pengesahan. Dalam hal penganggaran, dana pembangunan tahun 2023 berasal dari berbagai sumber, yaitu Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Kalurahan (PAK_{al}), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dengan penekanan utama pada penggunaan Dana Desa tahap I dan II untuk mendanai kegiatan pembangunan fisik.

Tabel 2. 1 Penganggaran Kegiatan Pembangunan

No	Jenis kegiatan	Volume	anggaran	Sumber dana
1	Pembangunan jalan cor blok	120 m x 2,5 m	Rp 75.000.000	Dana desa
2	Pembangunan talud jalan	90 m x 0,5 m	Rp 45.000.000	Dana desa
3	Pemberdayaan padat karya	3 titik kegiatan	Rp 30.000.000	Dana desa

Sumber data: RAB Kalurahan Singosaren

Pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Singosaren tahun 2023 dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah kalurahan melalui Surat Keputusan (SK) Lurah, dengan prinsip utama swakelola oleh masyarakat dan pendekatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk menyerap tenaga kerja lokal. Beberapa kegiatan fisik yang dilaksanakan antara lain pembangunan jalan cor blok di Padukuhan Singosaren Tengah pada bulan April hingga Mei 2023 dengan volume 120 m x 2,5 meter, melibatkan gotong royong masyarakat dan

menyerap sekitar 15 tenaga kerja per hari selama sepuluh hari. Selain itu, pembuatan talud di Padukuhan Singosaren Lor yang dikerjakan pada bulan Juni 2023 bertujuan memperkuat ketahanan tebing jalan terhadap potensi longsor. Kegiatan drainase lingkungan di RT 04 RW 01 juga dilaksanakan untuk mengatasi genangan air saat musim hujan, dengan durasi pekerjaan selama tujuh hari dan seluruh tenaga kerja berasal dari warga setempat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berlangsung sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, melibatkan lembaga desa seperti Karang Taruna, PKK, dan LPMKal. Sistem padat karya ini menjadi peluang kerja bagi masyarakat miskin dan penganggur lokal, sebagaimana dicontohkan oleh Pak Slamet, warga RT 03, yang sebelumnya bekerja serabutan dan pada kegiatan ini turut dilibatkan sebagai tenaga angkut material dengan upah harian sebesar Rp100.000 selama satu minggu.

3. Tahap Pengawasan dan Evaluasi

Tahap evaluasi dan pengawasan pembangunan tahun 2023 di Kalurahan Singosaren dilaksanakan secara menyeluruh dan sistematis melalui mekanisme yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pengawasan dilakukan secara berjenjang sejak tahap pra-pelaksanaan hingga pasca-kegiatan, melibatkan pemerintah kalurahan, BPKal, masyarakat, dan pendamping desa. Berbagai metode digunakan, seperti monitoring harian oleh TPK, kunjungan lapangan oleh BPKal, laporan mingguan kepada lurah, serta pemeriksaan administrasi oleh bendahara dan inspektorat internal. Partisipasi aktif masyarakat juga didorong melalui forum komunikasi dan fasilitas aduan di kantor kalurahan. Setelah kegiatan

selesai, evaluasi dilakukan melalui Forum Musyawarah Evaluasi Pembangunan Desa untuk menilai keberhasilan fisik, efektivitas anggaran, dan tingkat partisipasi masyarakat, serta merumuskan perbaikan untuk pembangunan berikutnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembangunan mayoritas berjalan tepat waktu, sesuai anggaran, dan berdampak langsung bagi warga, meskipun masih terdapat catatan terkait peningkatan kapasitas teknis TPK, koordinasi lembaga, dan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur. Seluruh proses pengawasan dan evaluasi didokumentasikan dalam bentuk laporan realisasi, berita acara, foto kegiatan, dan catatan masyarakat, yang menjadi arsip penting dan bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun DPMK Kabupaten Bantul. Pendekatan terbuka ini menjadi kekuatan utama dalam menjaga kualitas pembangunan serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan kalurahan.

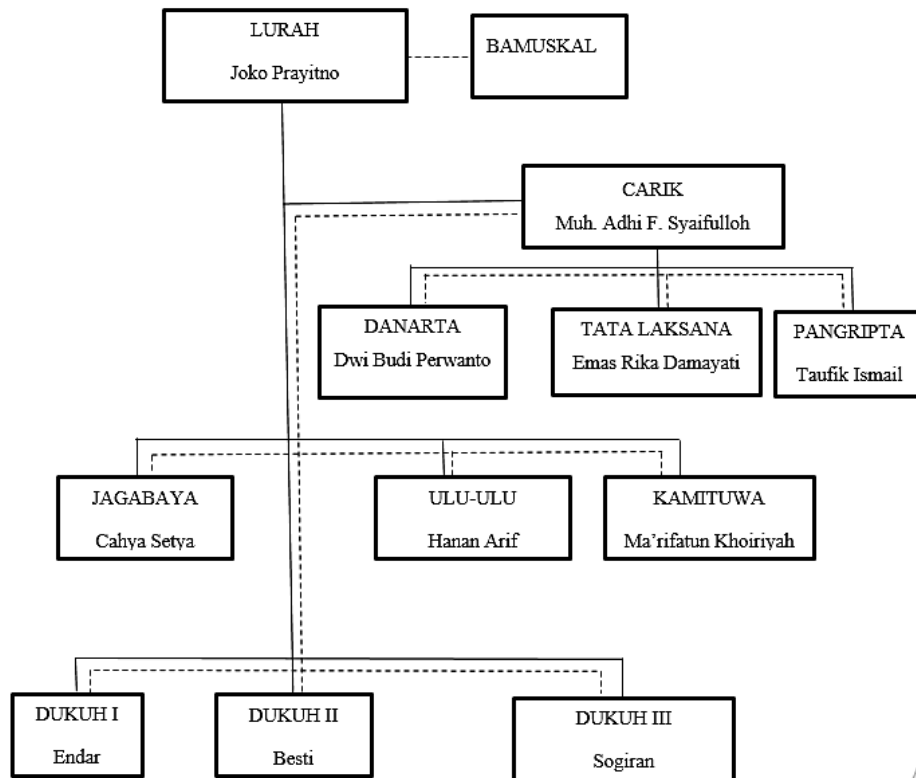
C. Kondisi Pemerintah Desa

1. Struktur Orgsnisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam Tatakelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggara urusan

pemerintah di tingkat Desa (Pemerintah Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan Singosaren



Keterangan:

- : garis komando / tanggung jawab
 - - - - - : garis koordinasi

Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Kalurahan berfungsi menetapkan Peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPKal berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Anggota BPKal adalah wakil dari pendudukan kalurahan bersangkutan berdasarkan

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPKAL berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berikut tabel daftar nama BPKAL Kalurahan Singosaren.

Tabel 2. 2 Nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Singosaren

No	Nama	Jabatan
1.	Aji Prasetya A. Md	Ketua
2.	Ari Wibowo S. Hum	Wakil Ketua
3.	Syarif Widayat S. Pd	Sekretaris
4.	Handan Hariyanto	Bendahara
5.	Dalilah	Anggota

Sumber data: RPJMDes Desa Singosaren, April 2025

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa secara struktural di Badan Permusyawaratan Kalurahan Singosaren sangat mumpuni jika dilihat dari jenjang pendidikan terakhir. Oleh harapannya bahwa tetap kompak dan tetap menjaga marwah BPKAL sebagai opsi di tingkat Kalurahan terlebih khususnya di Kalurahan Singosaren dan tentunya tetap menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan Singosaren.

Tabel 2. 3 Nama-nama LPMD Desa Singosaren

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Wilardjo S.H	Ketua
2.	Rahardjo PH	Sekretaris
3.	M. Syahid S. Ag	Sekretaris
4.	Ramelan	Bendahara
5.	Suharno	Bendahara
6.	Drs. Pranoto Hadi	Sie Pendidikan
7.	Drs. Alfian Hendi	Sie Pendidikan

No	Nama	Jabatan
8.	H Jirahman	Sie ekonomi
9.	Wardani S. Ag	Sie ekonomi
10.	Drs. Sajad	Sie agama
11.	Slamet Fusan	Sie agama
12.	Nina Daryanta	Sie perempuan
13.	Tanti Rismayanti	Sie Perempuan
14.	Ambar Sejati	Sie Perempuan
15.	Didik Mulyadi	Sie budaya
16.	M Juhari	Sie budaya
17.	Ir. Parmadi	Sie pembangunan
18.	Suhardi	Sie pembangunan
19.	Hanggar Cahyo N	Sie olahraga
20.	Hanan Arif Setiawan	Sie olahraga

Sumber data: RPJMDes Desa Singosaren, April 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa lembaga kemasyarakatan desa secara struktural sudah sangat jelas. Harapannya bahwa lembaga kemasyarakatan desa tersebut terus dijaga tentunya untuk bersama-sama memajukan Desa Singosaren yang lebih baik. Selanjutnya akan disajikan tabel terkait tim penggerak PKK desa Singosaren.

Tabel 2. 4 Tim Penggerak PKK Desa Singosaren

No	Nama	Jabatan
1.	H. Joko Prayitno	Ketua Pembina TP PKK
2.	Dra. Fatimah	Anggota Pembina TP PKK
3.	Siti Asfiah S.Ag. MM	Ketua TP PKK
4.	Ambar Sejati	Wakil ketua
5.	Andri Hermiyati S. Pd	Skretaris
6.	Atik Kartika	Wakil sekretaris I
7.	Eni Astuti S. Kep, Ns	Wakil sekretaris II
8.	Eni Hartati	Bendahara

No	Nama	Jabatan
9.	Mujiyatmi	Wakil bendahara I
10.	Yuli Sukarsiah	Wakil bendahara II
11.	Istiar	Ketua pokja I
12.	Larasati mawti S. Pd, M. Si	Sekretaris pokja I
13.	Nur ristina	Bendahara pokja I
14.	Maria Romawi	Anggota pokja I
15.	Sutiningsih	Anggota pokja I
16.	Isnarti	Anggota pokja I
17.	Tri wahyu widaryati	Anggota pokja I
18.	Rosidah	Anggota pokja I
19.	Tri suharti	Anggota pokja I
20.	Rina setiawati	Anggota pokja I
21.	Dra. Hj. Sri Rahayu	Ketua pokja II
22.	Endah suparni	Sekretaris pokja II
23.	Ngatini	Bendahara pokja II
24.	Hj. Ngatini S. Pd	Anggota pokja II
25.	Sulastri S. Pd	Anggota pokja II
26.	Tanti wakhidatun	Anggota pokja II
27.	Dra. Sri Subarsidah	Anggota Pokjak II
28.	Sunayah	Anggota Pokja II
29.	Atiek Minarsih	Anggota Pokja II
30.	Kamisah	Anggota Pokja II
31.	Diah Nuril Arofah	Ketua Pokja III
32.	Supriyati	Sekretaris Pokja III
33.	Dalilah	Bendahara Pokja III
34.	Eni Kurniati	Anggota Pokja III
35.	Khotijah	Anggota Pokja III
36.	Sri Hidayati	Anggota Pokja III
37.	Christin Handayani	Anggota Pokja III
38.	Murtini	Anggota Pokja III
39.	Ngatinah	Anggota Pokja III

No	Nama	Jabatan
40.	Tri Widayati	Anggota Pokja III
41.	Karsini	Anggota Pokja III
42.	Eko Budimah	Anggota Pokja III
43.	Tanti Rismayani	Ketua Pokja IV
44.	Yuni Astuti	Sekretaris Pokja IV
45.	Riawati	Bendahara IV
46.	Parwati	Anggota Pokja IV
47.	Siti Aisah	Anggota Pokja IV
48.	Nunuk Supriyati	Anggota Pokja IV
49.	Suryandari	Anggota Pokja IV
50.	Sarjinih	Anggota Pokja IV
51.	Dasmi	Anggota Pokja IV
52.	Praptinah	Anggota Pokja IV
53.	Tri Winarsih	Anggota Pokja IV
54.	Aminah	Anggota Pokja IV

Sumber Data: RPJMDes Desa Singosaren, April 2025

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa untuk tim penggerak PKK di Desa Singosaren secara struktural sangat jelas. Tentunya tidak sebatas struktural saja, harapanya bahwa dengan adanya tim penggerak PKK tersebut dapat membantu proses Pembangunan di Desa Singosaren. Proses tersebut dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pada evaluasi.

D. Mekanisme partisipasi Masyarakat di Kalurahan Singosaren

Mekanisme pengambilan Keputusan di Kalurahan Singosaren pada pelaksanaan memiliki beberapa tahap. Tahap tersebut terdiri dari musyawarah ditingkat RT kemudian dilanjutkan musyawara di tingkat padukuhan sampai pada musyawarah di tingkat kalurahan.

1. Partisipasi Masyarakat di Tingkat RT.

Musyawarah di tingkat RT merupakan momentum pengambilan Keputusan yang paling demokratis. Dimana dalam momentum ini usulan-usulan Masyarakat semuanya tertampung dalam musyawarah RT ini. Berbagai banyak usulan tersebut nantinya diputuskan secara bersama sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah RT masing-masing. Keputusan tersebut nantinya akan di bawah ke musyawarah di tingkat padukuhan. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab dari ketua RT untuk mengawasi dan mengontrol secara langsung hasil musyawarah RT. Karena hasil musyawarah RT adalah keputusan yang benar-benar representatif dari masyarakat desa.

2. Partisipasi Masyarakat di Tingkat Padukuhan

Musyawarah padukuhan merupakan tahap musyawarah desa kedua setelah musyawarah RT. Pada tahapan ini yang dibahas adalah menindaklanjuti hasil keputusan yang telah disepakati bersama pada saat musyawarah di tingkat RT, serta membahas terkait kebutuhan padukuhan yang belum dibahas pada saat musyawarah di tingkat RT. Pada proses pelaksanaannya dinamika musyawarah di tingkat padukuhan tidak sama seperti musyawarah di tingkat RT. Musyawarah di tingkat padukuhan lebih kepada musyawarah keterwakilan. Artinya bahwa keterlibatan masyarakat desa sangat dibatasi tidak seperti pada musyawarah di tingkat RT. Oleh karena itu harus dikawal betul-betul oleh setiap ketua RT. Sehingga sampai pada keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Selanjutnya akan disajikan tabel berikut jumlah peserta yang hadir pada musyawarah di tingkat padukuhan.

Tabel 2. 5 Jumlah Peserta yang Hadir pada Musyawarah di Tingkat Padukuhan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Endar Gunawan	Laki-laki	Dukuh
2.	Muhamad Ulil	Laki-laki	Pemuda
3.	Tursino	Laki-laki	Ketua RT 04
4.	Widiyanto	Laki-laki	Ketua RT 05
5.	Fauzi	Laki-laki	Ketua RT 02
6.	Danang	Laki-laki	Ketua RT 03
7.	Joko Prayetno	Laki-laki	Lurah
8.	Andri Hermiyati	Perempuan	Kader
9.	Siti asifah	Perempuan	PKK
10.	Danang Iskandar	Laki-laki	Ketua RT 01
11.	Ari wibowo	Laki-laki	Buruh

Sumber Data: Daftar Hadir Musyawarah Padukuhan Singosaren 1, Maret 2025

Dari tabel di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah di tingkat padukuhan pada pelaksanaannya lebih kepada musyawarah keterwakilan. Sangat terlihat jelas bahwa yang hadir adalah perwakilan dari setiap ketua RT. Meskipun ada elemen masyarakat desa lainnya tetapi yang lebih dominan hadir adalah para ketua RT. Oleh karena itu pada tahapan ini diharapkan harus dikawal secara ketat aspirasi dari masyarakat. Terlebih khususnya para ketua RT dan kepala desa

3. Partisipasi Masyarakat di Tingkat Desa

Partisipasi masyarakat tercermin dalam berbagai kegiatan seperti pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar Sari dan Maju Makmur, pengelolaan Kampung KB Singosaren 3 untuk

pemanfaatan lahan pekarangan, pelaksanaan program kesehatan lingkungan seperti Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang melibatkan kader jentik dan warga, serta keterlibatan aktif dalam musyawarah desa (muskal/musrenbang) untuk merencanakan pembangunan. Sementara itu warga turut memantau pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa guna memastikan transparansi dan bersama pemerintah desa mendirikan koperasi desa merah putih sebagai upaya penguatan ekonomi lokal.

BAB III

MEMBONGKAR PRAKTEK PARTISIPASI DI KALURAHAN SINGOSAREN

A. Melihat partisipasi eksploitasi di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

Dalam bab ini akan dijelaskan secara menyeluruh terkait dengan beberapa hal yang peneliti temukan di hasil penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga cara yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung ke lokasi untuk memberikan gambaran besar tentang Praktek berdesa dan pemerintahan desa di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul. Informan yang diwawancarai berjumlah 8 (delapan) orang yaitu sebagai berikut:

Wawancara secara langsung peneliti bersama Lurah sebagai berikut:

“Partisipasi gotong royong dari masyarakat, ada beberapa tradisi yang menggunakan gotong royong dalam rangka 17 Agustus, hajatan, bantuan bantuan dari tenaga pikiran inilah partisipasi masyarakat yang tumbuh. Partisipasi dari masyarakat kerja bakti sehingga ongkos tukang itu kurang karena di kerjakan oleh warga, masyarakat sering terlibat dalam kegiatan pembangunan, peran pemerintah dalam pemerintah desa, adanya support dari pemerintah untuk masyarakat. Adapun beberapa wujud partisipasi secara umum yaitu bersih-bersih lingkungan, sampai pada ketika ada hajatan pun terdapat partisipasi masyarakat dalam bentuk materil dan tenaga”.

Hasil wawancara langsung dengan Lurah Kalurahan Singosaren mengungkap bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih tumbuh kuat dalam bentuk gotong royong, baik dalam kegiatan rutin seperti kerja bakti lingkungan, acara peringatan 17 Agustus, maupun dalam peristiwa sosial seperti hajatan. Wujud partisipasi ini tidak hanya berbentuk tenaga dan pikiran, tetapi juga materi, yang secara langsung mengurangi biaya pembangunan karena

banyak pekerjaan dilakukan oleh warga tanpa upah. Pemerintah kalurahan berperan sebagai fasilitator dengan memberikan dukungan dan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan Singosaren belum sepenuhnya bersifat eksploitasi, namun masih berada dalam ranah partisipasi fungsional dan spontanitas kolektif, yang tumbuh dari nilai budaya lokal seperti gotong royong. Meskipun demikian, bila tidak dikawal dengan pendekatan yang setara, potensi eksploitasi partisipasi bisa muncul—misalnya ketika kontribusi warga dimanfaatkan untuk menekan biaya proyek tanpa transparansi dan penghargaan yang layak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa partisipasi yang terjadi bersifat sukarela, sadar, dan adil, serta bahwa warga memiliki ruang kontrol dan pengambilan keputusan atas proses pembangunan yang mereka ikuti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bamuskal menyatakan bahwa:

“Secara aturan, Bamuskal punya fungsi pengawasan. Tapi masyarakat umum jarang ikut mengawasi secara detail. Kami sudah membuat laporan pertanggungjawaban. Masalahnya, tidak semua warga paham bagaimana cara membaca atau menilai laporan keuangan”.

Pernyataan Ketua Bamuskal Kalurahan Singosaren menunjukkan bahwa meskipun secara kelembagaan Bamuskal memiliki fungsi formal sebagai pengawas jalannya pembangunan, partisipasi masyarakat umum dalam pengawasan masih sangat minim, terutama dalam aspek teknis seperti evaluasi laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap dokumen pertanggungjawaban dan mekanisme administrasi pemerintahan desa. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan akses

terhadap informasi dan kontrol, di mana partisipasi warga dibatasi hanya pada tahap pelaksanaan (seperti gotong royong), namun tidak dilibatkan secara utuh dalam proses pengawasan dan evaluasi.

Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi mengarah pada bentuk eksploitasi partisipasi, di mana masyarakat diminta berkontribusi dalam bentuk tenaga dan waktu, tetapi tidak diberikan kesempatan yang setara untuk mengakses, memahami, atau mengkritisi pengelolaan anggaran pembangunan. Partisipasi semacam ini hanya bersifat simbolik, bukan partisipatif yang sejati. Oleh karena itu, pembangunan desa di Kalurahan Singosaren perlu diarahkan pada penguatan literasi anggaran masyarakat dan keterbukaan informasi publik agar partisipasi warga tidak hanya menjadi alat legitimasi, tetapi benar-benar berperan dalam mengontrol, menilai, dan mengarahkan pembangunan secara adil dan transparan.

Adapun wawancara dengan bapak Muhammad Adhi Fibrian Ali Syaifulloh selaku Carik adalah sebagai berikut:

“Desa membangun itu pada dasarnya kami mulai dari perencanaan. Jadi kami menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan setiap tahun. Prosesnya selalu melibatkan warga lewat musyawarah. Kami undang RT, RW, tokoh masyarakat, Bamuskal, dan perwakilan perempuan. Untuk pelaksanaan Pembangunan fisik misalnya pembangunan cor blok jalan atau saluran air, masyarakat terlibat kerja bakti. Ada juga yang jadi tenaga kerja harian. Tapi kalau untuk pengawasan, jujur saja masih kurang. Banyak warga merasa belum paham teknis pelaporan keuangan”.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Adhi Fibrian Ali Syaifulloh selaku Carik Kalurahan Singosaren menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa telah diupayakan secara formal, khususnya dalam tahapan perencanaan melalui musyawarah yang melibatkan RT, RW, tokoh

masyarakat, Bamuskal, dan perwakilan perempuan. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik, seperti pembangunan cor blok jalan dan saluran air, masyarakat juga terlibat aktif melalui kerja bakti dan sebagai tenaga kerja harian. Namun, partisipasi warga dalam aspek pengawasan masih lemah, terutama karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek teknis pelaporan keuangan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat cenderung berhenti pada tahap pelaksanaan fisik, dan belum berkembang menjadi partisipasi kritis dalam pengawasan dan pengambilan keputusan secara menyeluruh. Hal ini menciptakan potensi eksploitasi partisipasi, di mana kontribusi warga dimanfaatkan dalam bentuk tenaga kerja atau legitimasi kebijakan, namun mereka tidak memiliki kontrol atas proses dan hasil pembangunan. Ketimpangan ini mencerminkan bahwa partisipasi yang terjadi belum sepenuhnya berkeadilan, karena akses terhadap informasi dan kapasitas warga untuk terlibat dalam pengawasan masih terbatas. Oleh karena itu, pembangunan di Kalurahan Singosaren perlu diarahkan pada penguatan kapasitas warga dalam hal literasi anggaran, transparansi, dan mekanisme pengawasan, agar partisipasi yang terbentuk tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar memberdayakan.

Wawancara dengan Ibu Suryanti selaku masyarakat Kalurahan Singosaren menyampaikan bahwa:

“Masyarakat selalu berpartisipasi dalam pembangunan dan juga kegiatan di kalurahan sering diinformasikan kepada masyarakat hanya ada beberapa kegiatan saja yang saya ikuti palingan dalam lingkup RT saja kalau secara kalurahan saya jarang terlibat”.

Pernyataan Ibu Suryanti sebagai warga Kalurahan Singosaren mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih banyak terjadi pada level mikro, seperti kegiatan di tingkat RT, sementara keterlibatan dalam skala kalurahan masih terbatas. Meskipun informasi kegiatan kalurahan disampaikan, tidak semua warga merasa terlibat atau memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan secara menyeluruh, terutama dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa partisipasi warga bersifat semu atau terbatas pada ruang-ruang formal, sementara dalam praktiknya, masyarakat hanya dilibatkan pada bagian pelaksanaan teknis yang membutuhkan tenaga. Hal ini mengarah pada potensi eksploitasi partisipasi, di mana warga dilibatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional (seperti kerja bakti atau gotong royong), namun tidak diberdayakan secara aktif dalam proses substantif pembangunan, seperti merumuskan arah kebijakan atau mengevaluasi pelaksanaan program. Untuk itu, pembangunan di Kalurahan Singosaren perlu mendorong perluasan ruang partisipasi yang lebih inklusif dan setara agar warga tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga menjadi subjek pembangunan yang memiliki kendali dan pemahaman terhadap proses yang berjalan.

B. Desa membangun dan partisipasi Pembangunan di Kalurahan Singosaren sebatas formalitas saja

Konsep desa membangun menekankan pada kemampuan desa untuk berkembang secara mandiri tanpa intervensi dari pemerintah. Desa tersebut memanfaatkan berbagai potensi lokal yang ada serta melibatkan partisipasi aktif

dari masyarakat setempat. Dengan demikian, pembangunan yang terjadi dalam konteks desa membangun tidak bersifat top-down, melainkan berlangsung dari bawah ke atas. Selain itu dalam partisipasi pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, pembangunan desa menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Adapun hasil wawancara secara langsung peneliti dengan bapak H. Joko Prayitno selaku Lurah Singosaren sebagai berikut:

“Dalam hal perencanaan pembangunan musyawarah sudah menjadi agenda rutin setiap tahun. Kami mengundang ketua RT, RW, tokoh masyarakat, Bamuskal. Usulan warga kami tampung, tapi memang kebanyakan usulannya terkait pembangunan jalan, talud, sama drainase”.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Bamuskal menyatakan sebagai berikut:

“Pada tahap pelaksanaan fisik. Misalnya cor blok jalan, mereka kerja bakti. Tapi pada tahap perencanaan dan evaluasi, partisipasi masih minim”.

Wawancara dengan Ibu Besti Kusumawati Selaku Kepala Dusun Dua menyatakan bahwa:

“Konsep partisipasi sepenuhnya itu adalah usulan dari masyarakat, konsep partisipasi itu berbeda seriap wilayah contohnya ini dari beberapa gagasan dan pikiran masyarakat melalui dukuh, ke lurah. Peran pemerintah menjalin hubungan dengan masyarakat dan kita selalu hadir dalam setiap kegiatan masyarakat selain itu juga kita mensurvei setiap kegiatan masyarakat. Hambatan dalam partisipasi belum ada hanya yang perlu di lakukan komunikasi yang intensif. Penyaluran aspirasi dari RT, dukuh dan kalurahan sehingga kita dapat yang jangka pendek dan jangka Panjang sehingga adanya musdus semua lembaga dan masyarakat dilibatkan ada juga Bamuskal sehingga nanti diajukan ke Kalurahan setelah lolos aspirasi tersebut akan disosialisasikan ke masyarakat”.

Menyambung dengan hal tersebut wawancara dengan Kepala Dusun tiga menyatakan bahwa:

“Baguslah, partisipasi masyarakat selalu terlibat dalam pembangunan jalan karena tidak membayar tukang lagi sehingga dana tersebut digunakan untuk memfasilitasi masyarakat yang bekerja”.

Wawancara dengan Ketua RT Lima Padukuhan Singosaren dua menyatakan bahwa:

“Masyarakat selalu aktif dalam berpartisipasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kalurahan”.

Berdasarkan serangkaian wawancara yang dilakukan peneliti dengan berbagai tokoh desa di Kalurahan Singosaren — mulai dari Lurah, Ketua Bamuskal, Kepala Dusun, hingga Ketua RT — dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa memang hadir, namun masih cenderung bersifat seremonial dan belum menyentuh substansi pengambilan keputusan secara partisipatif yang utuh.

Lurah H. Joko Prayitno menyampaikan bahwa musyawarah tahunan rutin dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, namun usulan yang masuk pun umumnya hanya berputar pada hal-hal fisik seperti jalan, talud, dan drainase, menunjukkan terbatasnya ruang diskusi kritis dalam merumuskan agenda pembangunan yang lebih luas dan strategis. Ketua Bamuskal bahkan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat hanya tampak dalam pelaksanaan fisik seperti kerja bakti, sementara pada tahap perencanaan dan evaluasi masih sangat minim. Hal ini memperlihatkan bahwa keikutsertaan masyarakat lebih banyak terjadi pada level pelaksanaan teknis dibandingkan pengambilan keputusan.

Pernyataan Kepala Dusun Dua dan Kepala Dusun Tiga memang menunjukkan adanya proses penyampaian gagasan masyarakat melalui jalur struktural seperti RT dan Dukuh, namun mekanisme ini lebih menggambarkan

partisipasi yang tersaring, bukan yang langsung dan inklusif. Di sisi lain, meskipun Ketua RT menyatakan masyarakat “selalu aktif”, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas tersebut lebih banyak dimaknai sebagai keterlibatan fisik seperti tenaga kerja dalam proyek pembangunan, bukan partisipasi yang melibatkan pemahaman, evaluasi, dan pengawasan terhadap kebijakan desa secara menyeluruh.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat Kalurahan Singosaren lebih condong pada aspek formalitas administratif dan keterlibatan fisik, bukan pada ruang deliberatif yang memungkinkan warga terlibat dalam proses-proses krusial pengambilan keputusan pembangunan. Ini memperkuat asumsi bahwa konsep partisipasi di Kalurahan Singosaren belum sepenuhnya menjelma sebagai partisipasi substantif, melainkan masih sebatas pelengkap prosedural demi memenuhi persyaratan program desa membangun yang bersifat top-down.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti mendapatkan informasi yang begitu beragam yakni berkaitan dengan penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Data-data penelitian yang diperoleh melalui proses penelitian secara langsung dalam jangka waktu yang telah disesuaikan dengan kebutuhan informasi, dan dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu mengumpulkan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga dalam penelitian yang dilakukan menjelaskan apa adanya dan sesuai data yang diperoleh dari informan.

Berikut ini peneliti akan menarik kesimpulan terkait hal-hal yang digunakan sebagai pendekatan serta menyimpulkan secara umum tentang penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan di Kalurahan Triwidadi sebagai berikut:

1. bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih didominasi oleh bentuk-bentuk partisipasi fungsional dan bersifat simbolik.

Partisipasi warga umumnya terlihat dalam bentuk gotong royong, kerja bakti, dan kontribusi tenaga atau materi dalam kegiatan fisik, seperti pembangunan jalan atau acara peringatan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal seperti guyub dan gotong royong masih cukup kuat di masyarakat.

Namun demikian, partisipasi yang terjadi belum mencapai tingkat partisipasi substantif atau kritis. Keterlibatan warga dalam tahapan perencanaan dan pengawasan masih sangat terbatas. Musyawarah desa memang diselenggarakan, namun tidak semua warga merasa memiliki akses yang adil untuk menyampaikan aspirasi. Kegiatan pengawasan, seperti evaluasi laporan keuangan desa, tidak banyak melibatkan masyarakat karena keterbatasan literasi teknis dan minimnya transparansi.

Lebih jauh, ketimpangan peran antara warga sebagai pelaksana dan pemerintah desa sebagai pengendali arah pembangunan berpotensi menimbulkan praktik eksploitasi partisipasi, di mana warga hanya dijadikan alat legitimasi kebijakan atau sumber daya murah bagi pelaksanaan program. Hal ini terjadi karena keterlibatan warga lebih diarahkan pada aspek teknis dan operasional, bukan pada aspek strategis dan pengambilan keputusan.

Kondisi ini menuntut perubahan paradigma dalam pembangunan desa, dari yang bersifat top-down ke arah pemberdayaan sejati, dengan membuka ruang partisipasi warga secara inklusif dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengawasan, literasi anggaran, serta hak atas informasi. Dengan demikian, partisipasi tidak hanya menjadi kewajiban warga, melainkan juga hak yang memungkinkan mereka menjadi subjek aktif dalam proses pembangunan yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Kalurahan Singosaren

Praktek berdesa dan pemerintahan desa di Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan Singosaren masih didominasi oleh bentuk partisipasi yang bersifat formalitas dan seremonial.

Keterlibatan warga memang terjadi, terutama dalam bentuk kerja bakti pada tahap pelaksanaan fisik proyek seperti pembangunan jalan atau drainase. Namun, partisipasi pada tahap perencanaan dan evaluasi pembangunan masih sangat terbatas, baik dari sisi jumlah warga yang terlibat maupun kualitas keterlibatan yang terjadi.

Mekanisme musyawarah desa yang secara administratif rutin dilakukan nyatanya belum mampu mendorong partisipasi yang inklusif dan kritis. Usulan-usulan yang muncul dari masyarakat cenderung terbatas pada kebutuhan infrastruktur dasar, tanpa adanya ruang diskusi yang luas untuk menyentuh aspek pembangunan sosial, ekonomi, atau pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat lebih banyak disaring melalui jalur struktural formal seperti RT dan Dukuh, bukan melalui forum terbuka yang memungkinkan semua warga memiliki suara.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep "desa membangun" yang idealnya berorientasi pada kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat belum terwujud sepenuhnya di Kalurahan Singosaren. Partisipasi lebih berfungsi sebagai pelengkap administratif dalam siklus program pembangunan yang masih cenderung top-down. Dengan kata lain, warga lebih sering diposisikan sebagai pelaksana, bukan sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu, upaya mewujudkan partisipasi yang substansial — di mana

masyarakat berperan aktif dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan — masih menjadi tantangan utama dalam praktik berdesa di Kalurahan Singosaren.

B. Saran

Adapun beberapa saran dan masukan diberikan sebagai upaya untuk semakin memperkuat pembangunan berkelanjutan oleh pemerintah Kalurahan Singosaren bersama masyarakat Singosaren:

1. Mendorong Partisipasi Substantif Masyarakat

Pemerintah Kalurahan perlu mendorong partisipasi masyarakat yang tidak hanya bersifat seremonial atau simbolik, tetapi juga substantif dan bermakna. Hal ini dapat dimulai dengan membuka ruang-ruang diskusi yang lebih inklusif dan dialogis, seperti forum warga atau musyawarah tematik, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa melalui filter struktural yang kaku.

2. Penguatan Kapasitas dan Literasi Warga

Rendahnya keterlibatan warga dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan seringkali disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis dan informasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan literasi anggaran, pemahaman perencanaan pembangunan desa, serta hak atas informasi publik. Dengan demikian, warga tidak hanya aktif secara fisik, tetapi juga cerdas dan kritis dalam berpartisipasi

3. Transparansi dan Akses Informasi yang Lebih Terbuka

Pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi, khususnya terkait penggunaan dana desa, proses perencanaan, serta hasil evaluasi pembangunan. Informasi-informasi tersebut sebaiknya disampaikan melalui media yang mudah diakses masyarakat, seperti papan informasi desa, grup media sosial resmi, atau forum warga secara berkala partisipasi.

Memaksimalkan website kalurahan yang berisi informasi tentang kegiatan pembangunan, laporan keuangan, dan jadwal musyawarah. Dalam hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

4. Perluasan Mekanisme Partisipatif

Mekanisme partisipasi desa perlu diperluas, tidak hanya melalui jalur struktural RT dan Dukuh, tetapi juga membuka kesempatan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlibat, seperti perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Hal ini bertujuan agar pembangunan benar-benar mencerminkan kepentingan semua lapisan masyarakat.

5. Evaluasi Kritis terhadap Model Musyawarah Desa

Musyawarah desa sebagai sarana partisipasi perlu dievaluasi secara kritis, agar tidak hanya menjadi rutinitas administratif tahunan. Pemerintah desa bersama Bamuskal dapat mendesain ulang model musyawarah desa yang

lebih partisipatif, dengan metode fasilitasi yang lebih interaktif, partisipan yang lebih beragam, dan hasil musyawarah yang benar-benar dijadikan dasar kebijakan.

6. Perubahan Paradigma Pemerintahan Desa

Pemerintah Kalurahan perlu mengubah pendekatan dari pola top-down ke pola pemberdayaan. Artinya, warga tidak hanya dilibatkan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai pemilik proses pembangunan itu sendiri. Ini menuntut adanya perubahan dalam pola pikir aparatur desa dari yang semata-mata mengontrol menjadi lebih kolaboratif dan melayani.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Idham Noviar, Evi Priyanti. (2023). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Jurnal pemerintahan dan politik, diunduh 2 desember 2024 dari situs <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/2929>
- Lukmanul, S.Ag, M.Si. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. Jurnal politik Indonesia, diunduh 5 desember 2024 dari situs <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/963>
- Beatus Tambaip, Paul Adryani Moento, Alexander Phuk Tjilen. (2023). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Jurnal ilmu administrasi dan sosial, diunduh 5 desember 2024 dari situs <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/5096>
- M. Wahyuddin, H. Mustari dan Harna. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Phinisi Integration Review, diunduh pada tanggal 2 Januari 2025 dari situs <https://eprints.unm.ac.id/28552/1/Jurnal.pdf>
- Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda dan Beby Masitho Batubara. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, diunduh pada tanggal 2 Januari 2025 dari situs <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/749/pdf>
- Ecin Sante, Vecky A. J. Masinambow, Jacline I. Sumual. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, diunduh pada Tanggal 2 Januari 2025 dari situs <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/44354/40857>
- Setyaning, 2019, Kapasitas Lurah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Terhadap Desa Membangun Di Kalurahan Condong Catur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Di unduh pada tanggal 18 february 2025 dari situs <http://repo.apmd.ac.id/3146/1/SETYANINGSIH%2019520004.pdf>

Buku:

- Bihamding Hariawan, 2019. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Eko Sutoro, 2015. *Regulasi Baru Desa Baru*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi.

Sukriono Didit dkk, 2014. *Otonomi Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat*. Malang: Intrans Institute

Eko Sutoro Dkk, 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

Internet:

<https://www.desa-dwitiro.com/web/post/sejarah>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.

undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Dokumentasi setelah wawancara dengan Ketua RT.5



Dokumentasi setelah wawancara dengan Bapak Lurah Singosaren



Dokumentasi setelah wawancara dengan Bapak Carik Singoren



Dokumentasi setelah wawancara dengan warga Singosaren



Dokumentasi setelah wawancara dengan warga Singosaren



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 106/PEM/J/X/2024

Hal : Pemunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

K e p a d a :

Drs. Jaka Triwidaryanta., M.Si

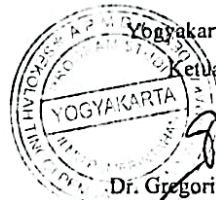
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Yohanes Delasales Laba Lawer
No. Mahasiswa	: 21520076
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	: 10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 10 Oktober 2024

Ketua Program Studi

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KALURAHAN SINGOSAREN**

ꦏꦁꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦶꦁꦺꦴꦱꦂꦺꦤ꧀

Sarirejo II RT.005 Singosaren Banguntapan Bantul Telp. (0274)4436567 Kode Pos 55193
Website: <https://singosaren-bantul.desa.id> Email : desa.singosaren@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN

No:138/PE/SNG/VII/2025

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

MEMPERHATIKAN :

Surat dari : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD “
Yogyakarta
Nomor : 203/I/U/2025
Tanggal : 11 Maret 2025
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir di Masyarakat
Kalurahan Singosaren

MENERANGKAN BAHWA :

Nama : **YOHANES DELASALES LABALAWER**
NIM : 21520057
Alamat : Jl.Nakula Sokowaten Banguntapan Bantul

Telah melakukan kegiatan Penelitian di Masyarakat Kalurahan Singosaren pada tanggal 20 Maret 2025 sampai 20 April 2025 dengan judul Penelitian “ **Membongkar Praktek Partisipasi Dalam Desa Membangun** “

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Singosaren, 10 Juli 2025

Kalurahan Singosaren



H. JOKO PRAYITNO